

Wakil Ketua DPRD SBB Ngaku Terima Rp 50 Juta

29 Jun 2016



AMBON - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Mustafa Nasir Raharusun mengakui menerima uang Rp 50 juta yang ditransfer ke rekening pribadinya.

Fulus itu berasal dari dana Biaya Tak Terduga (BTT) SBB tahun 2013 yang bersumber dari APBN. Namun politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu berkelit tak mengetahui proses transfer yang masuk ke tabungannya di Bank Mandiri. Dia berdalih baru mengetahui setelah kasus ini mencuat dan ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku.

Hal ini disampaikan Mustafa kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kejati Maluku, Rabu (28/6). Mustafa memenuhi panggilan jaksa penyidik setelah dua kali dilayangkan surat panggilan untuk diperiksa sebagai saksi.

Dalam kasus kasus BTT SBB senilai Rp 2,2 miliar yang merugikan negara Rp 1 miliar, Kejati Maluku telah menetapkan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten SBB, Ronny Dirk Rumalatu sebagai tersangka.

Musfata menjelaskan, pada tahun 2013 lalu uang senilai Rp 50 juta masuk ke rekening miliknya. Dia mengaku saat itu tidak mengetahui siapa yang mentransfer uang sebesar itu.

Saat kasus BTT mencuat, dalam proses penyidikan namanya disebut-sebut menerima aliran dana dari bendahara kegiatan BTT SBB. Ketika menerima uang “haram” itu, Mustafa belum menjabat Wakil Ketua DPRD SBB. “Saat ditanya jaksa baru saya mengetahui uang itu ternyata bersumber dari BTT SBB,” ungkapnya.

Mustafa diperiksa jaksa Haris selama tiga jam, mulai pukul 13.00 WIT. Dia ditanya seputar proses pencairan dana BTT di Dinas PPKAD Kabupaten SBB. Sebab berdasarkan keterangan tersangka Ronny Rumatatu, Mustafa juga ikut menerima aliran dana BTT tersebut.

Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulete mengatakan Mustafa dimintai keterangan sebagai saksi. Keterangannya dibutuhkan untuk dikonfrontir dan melengkepai berkas perkara Ronny Rumatatu.

Sebelumnya penyidik juga telah memeriksa mantan Anggota DPRD SBB, Mokhsin Attamimi sebagai saksi.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, usai diperiksa tim penyidik, Dirk Rumatatu mengaku separuh dana BTT mengalir ke kantong pribadi Mustafa.

Uang diserahkan oleh bendahara BTT saat Mustafa berada di Jakarta tahun 2013 lalu. Uang “haram” itu diberikan saat Mustafa belum terpilih sebagai anggota DPRD SBB.

Sebagaimana diketahui dalam kasus ini, penyidik juga telah memeriksa Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat. Penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan Bupati dalam pencairan dana BTT tahun 2013 sebesar Rp 2,2 miliar.

Saat diperiksa, Bupati menyangkal menandatangani pencairan. Orang nomor satu di SBB itu menuduh Dirk Rumatatu memalsukan stempel bupati, memo dan tanda tangannya untuk mencairkan dana BTT.

Saat diperiksa Bupati juga membantah menerima Rp 500 juta dari Woody Timisela, mantan ajudannya untuk kepentingan Pilkada Kabupaten SBB tahun 2013 lalu. **(KAF/RUZ)**